



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025, telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah, yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRPT, dimana Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah;

d. bahwa...../2

- d. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah perubahan APBD, jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- e. bahwa berdasarkan Bab V huruf T angka 1 huruf b angka 1), Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa maka pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRPT untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
- f. bahwa berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk melakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja, uraian rincian obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, pada anggaran belanja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan...../5

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

22. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 197);

31. Keputusan Menteri...../7

31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
32. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3), yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp 3.881.272.091.833,00, bertambah sebesar (Rp179.564.635.500,00) sehingga menjadi Rp 4.060.836.727.333,00, yang bersumber dari:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Rincian Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;

1) Semula	Rp.	525.520.666.514,00
2) Sesudah	Rp.	0,00
Jumlah		
Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	525.520.666.514,00

b. Pendapatan...../8

- b. Pendapatan Transfer;
- | | | |
|--------------|----|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.515.980.548.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp | 116.520.392.000,00 |
- Jumlah
Pendapatan
Transfer
Setelah
Perubahan
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| | Rp. | 2.399.460.156.000,00 |
|--|-----|----------------------|
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
- | | | |
|------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 839.770.877.319,00 |
| 2) Sesudah | Rp. | 0,00 |
- Jumlah Lain-lain
Pendapatan
Daerah Yang Sah
Setelah
Perubahan
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| | Rp. | 839.770.877.319,00 |
|--|-----|--------------------|

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a semula sebesar Rp 525.520.666.514,00 tidak ada perubahan sehingga tetap menjadi Rp 525.520.666.514,00, sebagai berikut:
- a. Pajak Daerah
- | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 518.420.666.514,00 |
| 2) Bertambah/
Berkurang | Rp. | 0 |
- Jumlah Pajak
Daerah Setelah
Perubahan
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| | Rp. | 518.420.666.514,00 |
|--|-----|--------------------|
- b. Lain-lain PAD yang sah
- | | | |
|----------------------------|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 7.100.000.000,00 |
| 2) Bertambah/
Berkurang | | |
- Setelah
Perubahan
- | | | |
|--|-----|------|
| | Rp. | 0,00 |
|--|-----|------|
- Jumlah lain-lain
PAD yang sah
setelah
perubahan
- | | | |
|--|-----|------------------|
| | Rp. | 7.100.000.000,00 |
|--|-----|------------------|
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b semula sebesar Rp 2.515.980.548.000,00 berkurang sebesar Rp - 116.520.392.000,00 sehingga menjadi Rp 2.399.460.156.000,00, sebagai berikut:

1) Semula...../9

1)	Semula	Rp.	2.515.980.548.000,00
2)	Berkurang	Rp.	-116.520.392.000,00
Jumlah			
Pendapatan			
Transfer			
Pemerintah Pusat			
	Setelah Perubahan	Rp.	2.399.460.156.000,00
(3)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c semula sebesar Rp.839.770.877.319,00 tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp 839.770.877.319,00, sebagai berikut:		
a.	Pendapatan Hibah:		
1)	Semula	Rp.	1.075.000.000,00
2)	Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah			
Pendapatan			
Transfer Antar			
Daerah Setelah			
	Perubahan	Rp.	1.075.000.000,00
b.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan:		
1)	Semula	Rp.	838.695.877.319,00
2)	Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah			
Pendapatan			
Transfer Antar			
Daerah Setelah			
	Perubahan	Rp.	838.695.877.319,00

3. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12...../10

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.3.881.272.091.833,00 bertambah sebesar (Rp.179.564.635.500,00) menjadi sebesar Rp.4.060.836.727.333,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
 - 1) Semula Rp. 2.354.902.269.388,00
 - 2) Bertambah Rp. 202.124.270.570,00
 - Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan Rp. 2.557.026.539.958,00
- b. Belanja Modal;
 - 1) Semula Rp. 932.131.691.222,00
 - 2) Bertambah Rp. 80.895.356.141,00
 - Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 1.013.027.047.363,00
- c. Belanja Tidak Terduga;
 - 1) Semula Rp. 313.213.279.698,00
 - 2) Berkurang Rp. 138.454.991.211,00
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 174.758.288.487,00
- d. Belanja Transfer.
 - 1) Semula Rp. 281.024.851.525,00
 - 2) Bertambah Rp. 35.000.000.000,00
 - Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan Rp. 316.024.851.525,00

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a semula sebesar Rp.2.354.902.269.388,00 bertambah sebesar Rp.202.124.270.570,00 menjadi sebesar Rp 2.557.026.539.958,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai:
 - 1) Semula Rp. 371.780.764.863,00
 - 2) Berkurang Rp. -428.596.799,00
 - Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 371.352.168.064,00
- b. Belanja Barang dan Jasa:
 - 1) Semula Rp. 1.832.912.751.714,00
 - 2) Bertambah Rp. 98.002.867.369,00
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 1.930.915.619.083,00

c. Belanja...../11

- c. Belanja Hibah;
1) Semula Rp. 135.604.304.511,00
2) Bertambah Rp. 104.550.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 240.154.304.511,00
- d. Belanja Bantuan Sosial.
1) Semula Rp. 14.604.448.300,00
2) Bertambah/
Berkurang Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 14.604.448.300,00
- (2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b semula sebesar Rp.932.131.691.222,00 bertambah sebesar (Rp.80.895.356.141,00) menjadi sebesar Rp.1.013.027.047.363,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
1) Semula Rp. 47.710.500.300,00
2) Berkurang Rp. -9.084.500.000,00
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan Rp. 38.626.000.300,00
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
1) Semula Rp. 178.340.314.975,00
2) Berkurang Rp. -1.079.895.946,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan Rp. 177.260.419.029,00
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
1) Semula Rp. 446.712.911.521,00
2) Bertambah Rp. 31.210.828.986,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan Rp. 477.923.740.507,00

d. Belanja...../12

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
1) Semula Rp. 253.967.964.426,00
2) Bertambah Rp. 59.648.923.101,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan Rp. 313.616.887.527,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
1) Semula Rp. 1.100.000.000,00
2) Bertambah/ Berkurang Rp. 0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan Rp. 1.100.000.000,00
- f. Belanja Modal Aset Lainnya
1) Semula Rp. 4.300.000.000,00
2) Bertambah Rp. 200.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan Rp. 4.500.000.000,00
- (3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c semula sebesar Rp.313.213.279.698,00 berkurang sebesar (Rp.138.454.991.211,00) menjadi sebesar Rp 174.758.288.487,00, terdiri atas:
1) Semula Rp. 313.213.279.698,00
2) Berkurang Rp. - 138.454.991.211,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 174.758.288.487,00
- (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d semula sebesar Rp 281.024.851.525,00 bertambah sebesar Rp 35.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp 316.024.851.525,00, terdiri dari:
a. Belanja Bagi Hasil;
1) Semula Rp. 244.899.851.525,00
2) Bertambara/ Kurang Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 244.899.851.525,00

b. Belanja...../13

b.	Belanja Bantuan		
	Keuangan.		
1)	Semula	Rp.	36.125.000.000,00
2)	Bertambah	Rp.	35.000.000.000,00
	Jumlah Belanja		
	Bantuan		
	Keuangan		
	Setelah		
	Perubahan	Rp.	71.125.000.000,00

12. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 22 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 23 dihapus.
22. Ketentuan Pasal 24 dihapus.
23. Ketentuan Pasal 25 dihapus.
24. Ketentuan Pasal 26 dihapus.
25. Ketentuan Pasal 27 dihapus.
26. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
27. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

28. Ketentuan...../14

28. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sebesar Rp.296.085.027.500,00, merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.296.085.027.500,00.
- (2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b tidak mengalami perubahan dengan jumlah sebesar Rp.0,00.

29. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

30. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- | | | |
|---------------|---|--|
| Lampiran I | : | Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | : | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran IIIa | : | Daftar Penerima, Alamat, Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima serta OPD Pemberi Hibah; |
| Lampiran IIIb | : | Daftar Penerima, Alamat, Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima serta OPD Pemberi Hibah; |
| Lampiran IVa | : | Daftar Penerima, Alamat, Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima serta OPD Pemberi Bantuan Sosial; |
| Lampiran IVb | : | Daftar Penerima, Alamat, Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima serta OPD Pemberi Bantuan Sosial; |
| Lampiran Va | : | Daftar Penerima, Alamat, Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima serta OPD Pemberi Bantuan Keuangan; |

Lampiran Vb...../15

- Lampiran Vb : Daftar Penerima, Alamat, Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima serta OPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- Lampiran VIa : Daftar Penerima, Alamat, Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
- Lampiran VIb : Daftar Penerima, Alamat, Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
- Lampiran VIc : Daftar Penerima, Alamat, Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kampung;
- Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IX : Rincian dan Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 16 Mei 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 16 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 007

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 6 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	525.520.666.514,00	525.520.666.514,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	518.420.666.514,00	518.420.666.514,00	0,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	75.599.762.000,00	75.599.762.000,00	0,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	191.026.000,00	191.026.000,00	0,00
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	191.026.000,00	191.026.000,00	0,00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	7.309.095.000,00	7.309.095.000,00	0,00
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	6.756.688.000,00	6.756.688.000,00	0,00
4.1.01.01.02.0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	37.267.000,00	37.267.000,00	0,00
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	515.140.000,00	515.140.000,00	0,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	42.984.748.000,00	42.984.748.000,00	0,00
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	41.653.892.000,00	41.653.892.000,00	0,00
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	687.218.000,00	687.218.000,00	0,00
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	643.638.000,00	643.638.000,00	0,00
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	449.937.000,00	449.937.000,00	0,00
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	233.196.000,00	233.196.000,00	0,00
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	49.045.000,00	49.045.000,00	0,00
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	167.696.000,00	167.696.000,00	0,00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	147.413.000,00	147.413.000,00	0,00
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	127.529.000,00	127.529.000,00	0,00
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	19.884.000,00	19.884.000,00	0,00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	9.017.962.000,00	9.017.962.000,00	0,00
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	6.866.490.000,00	6.866.490.000,00	0,00
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	786.153.000,00	786.153.000,00	0,00
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	1.365.319.000,00	1.365.319.000,00	0,00
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	4.367.303.000,00	4.367.303.000,00	0,00
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	1.877.503.000,00	1.877.503.000,00	0,00

4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	2.328.646.000,00	2.328.646.000,00	0,00
4.1.01.01.07.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	8.298.000,00	8.298.000,00	0,00
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	152.856.000,00	152.856.000,00	0,00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	1.767.253.000,00	1.767.253.000,00	0,00
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	1.104.710.000,00	1.104.710.000,00	0,00
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	652.646.000,00	652.646.000,00	0,00
4.1.01.01.08.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	3.358.000,00	3.358.000,00	0,00
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	6.539.000,00	6.539.000,00	0,00
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	11.502.000,00	11.502.000,00	0,00
4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	11.502.000,00	11.502.000,00	0,00
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	9.232.857.000,00	9.232.857.000,00	0,00
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	8.833.074.000,00	8.833.074.000,00	0,00
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	399.783.000,00	399.783.000,00	0,00
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	23.670.000,00	23.670.000,00	0,00
4.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	22.826.000,00	22.826.000,00	0,00
4.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	844.000,00	844.000,00	0,00
4.1.01.01.13	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	96.996.000,00	96.996.000,00	0,00
4.1.01.01.13.0001	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi	21.349.000,00	21.349.000,00	0,00
4.1.01.01.13.0003	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat	5.422.000,00	5.422.000,00	0,00
4.1.01.01.13.0004	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah	70.225.000,00	70.225.000,00	0,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	37.221.908.000,00	37.221.908.000,00	0,00
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	19.556.000,00	19.556.000,00	0,00
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	19.556.000,00	19.556.000,00	0,00
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	825.611.000,00	825.611.000,00	0,00
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	825.611.000,00	825.611.000,00	0,00
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	21.060.325.000,00	21.060.325.000,00	0,00
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	21.060.325.000,00	21.060.325.000,00	0,00
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	48.287.000,00	48.287.000,00	0,00
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	48.287.000,00	48.287.000,00	0,00

4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	4.801.736.000,00	4.801.736.000,00	0,00
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	4.801.736.000,00	4.801.736.000,00	0,00
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	1.190.389.000,00	1.190.389.000,00	0,00
4.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	1.190.389.000,00	1.190.389.000,00	0,00
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	356.618.000,00	356.618.000,00	0,00
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	356.618.000,00	356.618.000,00	0,00
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	14.673.000,00	14.673.000,00	0,00
4.1.01.02.09.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	14.673.000,00	14.673.000,00	0,00
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua	8.778.734.000,00	8.778.734.000,00	0,00
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua	8.778.734.000,00	8.778.734.000,00	0,00
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga	64.124.000,00	64.124.000,00	0,00
4.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga	64.124.000,00	64.124.000,00	0,00
4.1.01.02.12	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	61.855.000,00	61.855.000,00	0,00
4.1.01.02.12.0001	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	61.855.000,00	61.855.000,00	0,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	61.949.015.000,00	61.949.015.000,00	0,00
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	34.167.647.000,00	34.167.647.000,00	0,00
4.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	34.167.647.000,00	34.167.647.000,00	0,00
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	27.781.368.000,00	27.781.368.000,00	0,00
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	27.781.368.000,00	27.781.368.000,00	0,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	232.578.000.000,00	232.578.000.000,00	0,00
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	232.578.000.000,00	232.578.000.000,00	0,00
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	232.578.000.000,00	232.578.000.000,00	0,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	110.871.981.514,00	110.871.981.514,00	0,00
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	110.871.981.514,00	110.871.981.514,00	0,00
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	110.871.981.514,00	110.871.981.514,00	0,00
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.01.17.01	Pajak Alat Berat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.01.17.01.0001	Pajak Alat Berat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.100.000.000,00	7.100.000.000,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.04.12.01.0023	Pendapatan Denda PKB- Mobil Penumpang-Minibus- Pribadi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.515.980.548.000,00	2.399.460.156.000,00	116.520.392.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.515.980.548.000,00	2.399.460.156.000,00	116.520.392.000,00

4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	880.180.992.000,00	880.180.992.000,00	0,00
4.2.01.03.08	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua	261.875.164.000,00	261.875.164.000,00	0,00
4.2.01.03.08.0001	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00
4.2.01.03.08.0002	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	36.828.584.000,00	36.828.584.000,00	0,00
4.2.01.03.08.0003	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	0,00
4.2.01.03.08.0004	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
4.2.01.03.08.0009	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.2.01.03.08.0011	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00
4.2.01.03.08.0012	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	44.546.580.000,00	44.546.580.000,00	0,00
4.2.01.03.08.0013	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	0,00
4.2.01.03.08.0014	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.2.01.03.08.0015	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.2.01.03.08.0018	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00	0,00
4.2.01.03.11	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua	334.559.509.000,00	334.559.509.000,00	0,00
4.2.01.03.11.0001	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	100.367.853.000,00	100.367.853.000,00	0,00
4.2.01.03.11.0002	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	66.911.902.000,00	66.911.902.000,00	0,00
4.2.01.03.11.0003	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	167.279.754.000,00	167.279.754.000,00	0,00
4.2.01.03.12	DTI-Papua	283.746.319.000,00	283.746.319.000,00	0,00
4.2.01.03.12.0001	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	148.412.229.000,00	148.412.229.000,00	0,00
4.2.01.03.12.0002	DTI-Papua-Energi Listrik	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
4.2.01.03.12.0003	DTI-Papua-Air Bersih	31.587.771.000,00	31.587.771.000,00	0,00
4.2.01.03.12.0004	DTI-Papua-Telekomunikasi	13.746.319.000,00	13.746.319.000,00	0,00
4.2.01.03.12.0005	DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.038.771.472.000,00	1.038.771.472.000,00	0,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	279.792.529.000,00	279.792.529.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	134.837.080.000,00	134.837.080.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	144.955.292.000,00	144.955.292.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	157.000,00	157.000,00	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	757.955.445.000,00	757.955.445.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	751.513.378.000,00	751.513.378.000,00	0,00

4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	758.641.000,00	758.641.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0008	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.683.426.000,00	5.683.426.000,00	0,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	1.023.498.000,00	1.023.498.000,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	1.023.498.000,00	1.023.498.000,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	508.840.065.000,00	469.271.828.000,00	-39.568.237.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	440.242.999.000,00	440.242.999.000,00	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	440.242.999.000,00	440.242.999.000,00	0,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	68.597.066.000,00	29.028.829.000,00	-39.568.237.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2.926.107.000,00	2.926.107.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	26.102.722.000,00	26.102.722.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	39.568.237.000,00	0,00	-39.568.237.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	88.188.019.000,00	11.235.864.000,00	-76.952.155.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	76.952.155.000,00	0,00	-76.952.155.000,00
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	41.984.678.000,00	0,00	-41.984.678.000,00
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.885.916.000,00	0,00	-5.885.916.000,00
4.2.01.09.01.0081	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	23.191.561.000,00	0,00	-23.191.561.000,00
4.2.01.09.01.0091	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	5.890.000.000,00	0,00	-5.890.000.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	11.235.864.000,00	11.235.864.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.726.350.000,00	4.726.350.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	123.250.000,00	123.250.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	1.075.045.000,00	1.075.045.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0032	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	5.111.219.000,00	5.111.219.000,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	839.770.877.319,00	839.770.877.319,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	0,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	0,00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	0,00
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	838.695.877.319,00	838.695.877.319,00	0,00
4.3.03.03	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	838.695.877.319,00	838.695.877.319,00	0,00

4.3.03.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	838.695.877.319,00	838.695.877.319,00	0,00
4.3.03.03.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Provinsi	838.695.877.319,00	838.695.877.319,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	3.881.272.091.833,00	3.764.751.699.833,00	-116.520.392.000,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	2.354.902.269.388,00	2.557.026.539.958,00	202.124.270.570,00
5.1.01	Belanja Pegawai	371.780.764.863,00	371.352.168.064,00	-428.596.799,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	104.654.700.530,00	104.658.842.331,00	4.141.801,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	64.079.649.315,00	63.964.314.640,00	-115.334.675,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	64.079.649.315,00	63.964.314.640,00	-115.334.675,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	5.843.170.521,00	5.843.170.521,00	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.843.170.521,00	5.843.170.521,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.979.229.603,00	4.979.229.603,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.979.229.603,00	4.979.229.603,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	278.984.090,00	278.984.090,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	278.984.090,00	278.984.090,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.326.536.100,00	2.326.536.100,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.326.536.100,00	2.326.536.100,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	5.615.322.595,00	5.615.322.595,00	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	5.615.322.595,00	5.615.322.595,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	318.539.906,00	318.539.906,00	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	318.539.906,00	318.539.906,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.015.820,00	1.015.820,00	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.015.820,00	1.015.820,00	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.483.359.936,00	10.483.359.936,00	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.483.359.936,00	10.483.359.936,00	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	153.791.159,00	153.791.159,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	153.791.159,00	153.791.159,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	461.373.476,00	468.199.952,00	6.826.476,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	461.373.476,00	468.199.952,00	6.826.476,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.463.944.034,00	2.463.944.034,00	0,00

5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.463.944.034,00	2.463.944.034,00	0,00
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)	7.649.783.975,00	7.762.433.975,00	112.650.000,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	7.649.783.975,00	7.762.433.975,00	112.650.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	184.576.428.753,00	185.146.428.753,00	570.000.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	167.954.763.818,00	168.524.763.818,00	570.000.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	167.954.763.818,00	168.524.763.818,00	570.000.000,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.621.664.935,00	16.621.664.935,00	0,00
5.1.01.02.06.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	2.267.992.860,00	2.267.992.860,00	0,00
5.1.01.02.06.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.116.657.180,00	1.116.657.180,00	0,00
5.1.01.02.06.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.858.470.450,00	1.858.470.450,00	0,00
5.1.01.02.06.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan	6.977.340.000,00	6.977.340.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok	3.326.159.445,00	3.326.159.445,00	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	1.075.045.000,00	1.075.045.000,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRPT	56.789.936.980,00	55.787.198.380,00	-1.002.738.600,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRPT	1.782.900.000,00	1.782.900.000,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRPT	1.782.900.000,00	1.782.900.000,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRPT	855.792.000,00	855.792.000,00	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRPT	855.792.000,00	855.792.000,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRPT	296.217.600,00	296.217.600,00	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRPT	296.217.600,00	296.217.600,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRPT	152.820.000,00	152.820.000,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRPT	152.820.000,00	152.820.000,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRPT	2.215.584.000,00	2.215.584.000,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRPT	2.215.584.000,00	2.215.584.000,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRPT	402.723.000,00	402.723.000,00	0,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRPT	402.723.000,00	402.723.000,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRPT	94.743.000,00	94.743.000,00	0,00

5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRPT	94.743.000,00	94.743.000,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRPT	6.048.000.000,00	6.048.000.000,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRPT	6.048.000.000,00	6.048.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRPT	1.512.000.000,00	1.512.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRPT	1.512.000.000,00	1.512.000.000,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRPT	701.170.900,00	706.432.300,00	5.261.400,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRPT	701.170.900,00	706.432.300,00	5.261.400,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRPT	20.551.986.480,00	20.551.986.480,00	0,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRPT	214.070.304,00	214.070.304,00	0,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRPT	4.279.296,00	4.279.296,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRPT	12.836.880,00	12.836.880,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRPT	20.320.800.000,00	20.320.800.000,00	0,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRPT	20.160.000.000,00	20.160.000.000,00	0,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRPT	20.160.000.000,00	20.160.000.000,00	0,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRPT	2.016.000.000,00	1.008.000.000,00	-1.008.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRPT	2.016.000.000,00	1.008.000.000,00	-1.008.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	308.941.354,00	308.941.354,00	0,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	13.776.000,00	13.776.000,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	13.776.000,00	13.776.000,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	154.980.000,00	154.980.000,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	154.980.000,00	154.980.000,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	12.742.800,00	12.742.800,00	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	12.742.800,00	12.742.800,00	0,00

5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.694,00	1.694,00	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.694,00	1.694,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	10.194.240,00	10.194.240,00	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	10.194.240,00	10.194.240,00	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	611.656,00	611.656,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	611.656,00	611.656,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.834.964,00	1.834.964,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.834.964,00	1.834.964,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRPT serta KDH/WKDH	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
5.1.01.07	Belanja Gaji dan Tunjangan MRP	22.096.227.246,00	22.096.227.246,00	0,00
5.1.01.07.01	Belanja Uang Representasi MRP	1.203.930.000,00	1.203.930.000,00	0,00
5.1.01.07.01.0001	Belanja Uang Representasi MRP	1.203.930.000,00	1.203.930.000,00	0,00
5.1.01.07.02	Belanja Tunjangan Keluarga MRP	187.278.000,00	187.278.000,00	0,00
5.1.01.07.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga MRP	187.278.000,00	187.278.000,00	0,00
5.1.01.07.03	Belanja Tunjangan Beras MRP	258.767.040,00	258.767.040,00	0,00
5.1.01.07.03.0001	Belanja Tunjangan Beras MRP	258.767.040,00	258.767.040,00	0,00
5.1.01.07.04	Belanja Uang Paket MRP	103.194.000,00	103.194.000,00	0,00
5.1.01.07.04.0001	Belanja Uang Paket MRP	103.194.000,00	103.194.000,00	0,00
5.1.01.07.05	Belanja Tunjangan Jabatan MRP	1.745.698.500,00	1.745.698.500,00	0,00
5.1.01.07.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan MRP	1.745.698.500,00	1.745.698.500,00	0,00
5.1.01.07.06	Belanja Tunjangan Kelompok Kerja MRP	47.628.000,00	47.628.000,00	0,00
5.1.01.07.06.0001	Belanja Tunjangan Kelompok Kerja MRP	47.628.000,00	47.628.000,00	0,00
5.1.01.07.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif MRP	3.212.460.000,00	3.212.460.000,00	0,00
5.1.01.07.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif MRP	3.212.460.000,00	3.212.460.000,00	0,00
5.1.01.07.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP	27.312.558,00	27.312.558,00	0,00
5.1.01.07.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP	27.312.558,00	27.312.558,00	0,00
5.1.01.07.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP	15.309.959.148,00	15.309.959.148,00	0,00

5.1.01.07.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi MRP	124.727.148,00	124.727.148,00	0,00
5.1.01.07.12.0003	Belanja Jaminan Kematian MRP	515.970.000,00	515.970.000,00	0,00
5.1.01.07.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan MRP	14.669.262.000,00	14.669.262.000,00	0,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	2.104.530.000,00	2.104.530.000,00	0,00
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	2.104.530.000,00	2.104.530.000,00	0,00
5.1.01.89.01.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	2.104.530.000,00	2.104.530.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.832.912.751.714,00	1.930.915.619.083,00	98.002.867.369,00
5.1.02.01	Belanja Barang	886.189.451.943,00	896.849.121.085,00	10.659.669.142,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	816.047.071.005,00	830.547.731.147,00	14.500.660.142,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	183.760.000,00	183.760.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.801.710.784,00	14.777.064.064,00	-24.646.720,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	12.548.965.000,00	12.548.965.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	38.566.400,00	38.566.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	613.675.000,00	613.675.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.699.900.300,00	3.065.520.300,00	-634.380.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	272.413.400,00	272.413.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.436.070.500,00	2.436.070.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.169.103.408,00	16.249.116.708,00	80.013.300,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.509.701.000,00	10.547.702.200,00	38.001.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	37.150.360.855,00	37.556.380.755,00	406.019.900,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.293.492.881,00	4.340.702.881,00	47.210.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	269.174.300,00	280.409.300,00	11.235.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.272.425.600,00	2.252.931.800,00	-19.493.800,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	803.691.684,00	803.010.173,00	-681.511,00
5.1.02.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	711.384.675,00	1.198.104.675,00	486.720.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.689.550.100,00	4.619.900.100,00	-69.650.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	3.041.557.100,00	3.173.517.100,00	131.960.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan	3.793.115.300,00	3.793.099.300,00	-16.000,00

	untuk Kegiatan Kantor Lainnya			
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	48.569.900,00	69.877.400,00	21.307.500,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	363.980.340,00	363.980.340,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	217.299.440.130,00	228.860.555.130,00	11.561.115.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	153.573.547.498,00	148.983.533.121,00	-4.590.014.377,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	7.520.899.100,00	7.555.201.100,00	34.302.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	271.704.300,00	271.704.300,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.104.130.450,00	121.625.487.350,00	1.521.356.900,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	83.235.443.400,00	88.767.753.400,00	5.532.310.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	98.731.437.600,00	98.746.437.600,00	15.000.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	1.040.000.000,00	1.004.000.000,00	-36.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	885.950.000,00	885.950.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.527.025.000,00	927.025.000,00	-600.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.326.800.000,00	1.326.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	161.500.000,00	161.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	726.100.000,00	720.520.000,00	-5.580.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	3.609.250.000,00	3.865.821.750,00	256.571.750,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	566.375.000,00	904.375.000,00	338.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	70.142.380.938,00	66.301.389.938,00	-3.840.991.000,00
5.1.02.01.04.0585	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	54.246.389.938,00	54.246.389.938,00	0,00
5.1.02.01.04.0621	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	15.895.991.000,00	10.005.000.000,00	-5.890.991.000,00
5.1.02.01.04.0678	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	0,00	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	483.659.846.558,00	501.652.511.242,00	17.992.664.684,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	216.076.205.315,00	219.068.804.698,00	2.992.599.383,00

5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	271.200.000,00	271.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.164.138.500,00	35.449.888.500,00	-714.250.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.733.707.500,00	14.759.607.500,00	25.900.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	725.400.000,00	97.800.000,00	-627.600.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	287.360.000,00	287.360.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	457.500.000,00	457.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	441.600.000,00	441.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	291.500.000,00	291.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	15.141.000.000,00	15.141.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	639.000.000,00	753.000.000,00	114.000.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.878.300.000,00	9.852.800.000,00	-25.500.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	34.635.230.000,00	35.187.620.000,00	552.390.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.104.648.000,00	17.864.408.000,00	-240.240.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.812.112.000,00	3.591.120.000,00	-220.992.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.647.700.000,00	15.386.192.383,00	5.738.492.383,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	6.153.000,00	6.153.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5.548.530.000,00	5.272.130.000,00	-276.400.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	318.345.300,00	318.345.300,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.296.934.915,00	3.296.934.915,00	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	389.560.000,00	389.560.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan	14.505.760.600,00	14.217.760.600,00	-288.000.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	2.646.750.000,00	2.797.009.000,00	150.259.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	31.492.500,00	31.492.500,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.500.600.000,00	1.200.600.000,00	-300.000.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00

5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	19.436.347.000,00	18.197.347.000,00	-1.239.000.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	2.660.000.000,00	2.660.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.550.880.000,00	8.894.420.000,00	343.540.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.802.856.000,00	8.802.856.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	72.157.042.420,00	79.094.214.799,00	6.937.172.379,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	32.963.746.621,00	39.820.000.000,00	6.856.253.379,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	96.483.420,00	96.483.420,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	108.657.000,00	108.657.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	33.948.155.379,00	34.029.074.379,00	80.919.000,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	2.040.000.000,00	2.040.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	265.540.000,00	265.540.000,00	0,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	265.540.000,00	265.540.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	56.688.937.600,00	55.170.909.600,00	-1.518.028.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.286.837.100,00	12.512.161.100,00	225.324.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.231.636.000,00	12.826.524.000,00	-1.405.112.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	4.115.000.000,00	3.615.000.000,00	-500.000.000,00
5.1.02.02.04.0057	Belanja Sewa Kapal Terbang	22.056.100.000,00	22.056.100.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.300.064.500,00	1.435.824.500,00	135.760.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.549.300.000,00	2.575.300.000,00	26.000.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	55.118.547.000,00	51.614.523.000,00	-3.504.024.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	3.273.750.000,00	3.273.750.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	35.640.908.200,00	31.382.108.200,00	-4.258.800.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	0,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	15.088.888.800,00	13.863.664.800,00	-1.225.224.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	189.000.000,00	189.000.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	0,00	189.000.000,00	189.000.000,00

5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	14.833.964.223,00	31.389.909.145,00	16.555.944.922,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	333.000.000,00	333.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	11.792.000.000,00	18.087.497.227,00	6.295.497.227,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	18.870.000,00	18.870.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	800.000.000,00	0,00	-800.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	395.600.000,00	395.600.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	808.964.223,00	808.964.223,00	0,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	10.545.000,00	10.545.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	7.349.872.193,00	7.349.872.193,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	1.093.560.502,00	1.093.560.502,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0,00	2.192.000.000,00	2.192.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	22.400.000.000,00	21.338.000.000,00	-1.062.000.000,00

5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	950.000.000,00	600.000.000,00	-350.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.950.000.000,00	1.238.000.000,00	-712.000.000,00
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	1.280.000.000,00	1.280.000.000,00	0,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	1.280.000.000,00	1.280.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	44.419.610.000,00	41.821.610.000,00	-2.598.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	34.012.000.000,00	31.113.000.000,00	-2.899.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	4.916.750.000,00	5.217.750.000,00	301.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	4.290.860.000,00	4.290.860.000,00	0,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	40.396.809.470,00	110.622.442.736,00	70.225.633.266,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	8.187.500.000,00	75.291.882.191,00	67.104.382.191,00
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
5.1.02.03.01.0005	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	4.187.500.000,00	71.291.882.191,00	67.104.382.191,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.894.408.300,00	4.944.408.300,00	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.510.748.300,00	1.510.748.300,00	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	101.080.000,00	101.080.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00

	Angkutan Darat Bermotor Lainnya			
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	40.480.000,00	40.480.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	167.500.000,00	167.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.604.600.000,00	2.604.600.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.642.301.170,00	27.503.728.645,00	1.861.427.475,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	24.476.065.010,00	26.096.367.515,00	1.620.302.505,00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	216.236.160,00	216.236.160,00	0,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	42.450.970,00	42.450.970,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	0,00	198.674.000,00	198.674.000,00
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.000.000.000,00	2.209.823.600,00	1.209.823.600,00
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	0,00	411.186.400,00	411.186.400,00
5.1.02.03.04.0084	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00

	Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik			
5.1.02.03.04.0085	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	500.000.000,00	1.298.637.200,00	798.637.200,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	672.600.000,00	672.600.000,00	0,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	672.600.000,00	672.600.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	348.641.706.020,00	353.208.786.020,00	4.567.080.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	348.641.706.020,00	353.208.786.020,00	4.567.080.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	329.947.678.420,00	333.651.540.420,00	3.703.862.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.623.912.000,00	9.461.429.000,00	837.517.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.070.115.600,00	10.095.816.600,00	25.701.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	66.103.353.000,00	66.103.353.000,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	66.103.353.000,00	66.103.353.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.860.500.000,00	6.860.500.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	59.242.853.000,00	59.242.853.000,00	0,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	2.479.405.000,00	2.479.405.000,00	0,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	2.479.405.000,00	2.479.405.000,00	0,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	2.356.155.000,00	2.356.155.000,00	0,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	123.250.000,00	123.250.000,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.442.179.723,00	0,00	-5.442.179.723,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.442.179.723,00	0,00	-5.442.179.723,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.442.179.723,00	0,00	-5.442.179.723,00
5.1.05	Belanja Hibah	135.604.304.511,00	240.154.304.511,00	104.550.000.000,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	30.000.000.000,00	13.000.000.000,00	-17.000.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	30.000.000.000,00	13.000.000.000,00	-17.000.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	30.000.000.000,00	13.000.000.000,00	-17.000.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	104.971.447.311,00	226.521.447.311,00	121.550.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat	35.741.447.311,00	50.741.447.311,00	15.000.000.000,00

	Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	35.741.447.311,00	50.741.447.311,00	15.000.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.250.000.000,00	97.200.000.000,00	82.950.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.250.000.000,00	97.200.000.000,00	82.950.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	31.430.000.000,00	55.030.000.000,00	23.600.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	31.430.000.000,00	55.030.000.000,00	23.600.000.000,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	0,00
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	0,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	14.850.000.000,00	14.850.000.000,00	0,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	14.850.000.000,00	14.850.000.000,00	0,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	632.857.200,00	632.857.200,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	632.857.200,00	632.857.200,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	632.857.200,00	632.857.200,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.604.448.300,00	14.604.448.300,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	13.604.448.300,00	13.604.448.300,00	0,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	13.604.448.300,00	13.604.448.300,00	0,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	13.604.448.300,00	13.604.448.300,00	0,00

5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	932.131.691.222,00	1.013.027.047.363,00	80.895.356.141,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	47.710.500.300,00	38.626.000.300,00	-9.084.500.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	47.710.500.300,00	38.626.000.300,00	-9.084.500.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	47.710.500.300,00	38.626.000.300,00	-9.084.500.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	256.000.000,00	356.000.000,00	100.000.000,00
5.2.01.01.01.0005	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	14.000.000.000,00	0,00	-14.000.000.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	33.454.500.300,00	38.270.000.300,00	4.815.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.340.314.975,00	177.260.419.029,00	-1.079.895.946,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	595.582.000,00	558.251.056,00	-37.330.944,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	520.582.000,00	483.251.056,00	-37.330.944,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	120.582.000,00	83.251.056,00	-37.330.944,00
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	47.198.884.300,00	41.003.454.300,00	-6.195.430.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	35.428.074.300,00	35.753.454.300,00	325.380.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.531.000.000,00	3.531.000.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	12.736.000.000,00	12.579.000.000,00	-157.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.783.493.000,00	4.558.073.000,00	-225.420.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	14.377.581.300,00	15.085.381.300,00	707.800.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	11.770.810.000,00	5.250.000.000,00	-6.520.810.000,00
5.2.02.02.03.0001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	91.653.000,00	0,00	-91.653.000,00

5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	8.480.500.000,00	5.000.000.000,00	-3.480.500.000,00
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	2.948.657.000,00	0,00	-2.948.657.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	19.812.506.900,00	20.162.156.900,00	349.650.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	19.812.506.900,00	20.162.156.900,00	349.650.000,00
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	2.100.000.000,00	2.449.650.000,00	349.650.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	2.858.622.800,00	2.858.622.800,00	0,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	1.568.988.100,00	1.568.988.100,00	0,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	13.284.896.000,00	13.284.896.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	46.050.934.475,00	48.728.237.842,00	2.677.303.367,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	6.966.752.000,00	6.966.752.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	194.670.000,00	194.670.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.772.082.000,00	6.772.082.000,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	38.901.783.975,00	41.579.087.342,00	2.677.303.367,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	9.080.416.100,00	11.562.270.916,00	2.481.854.816,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	36.603.000,00	36.603.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.172.230.200,00	1.321.693.480,00	149.463.280,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	729.831.300,00	413.981.300,00	-315.850.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.178.378.375,00	27.540.213.646,00	361.835.271,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	704.325.000,00	704.325.000,00	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	182.398.500,00	182.398.500,00	0,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	77.096.500,00	77.096.500,00	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	105.302.000,00	105.302.000,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.135.099.900,00	5.265.099.900,00	-870.000.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	6.109.761.900,00	5.239.761.900,00	-870.000.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.051.843.900,00	1.051.843.900,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.611.149.000,00	2.611.149.000,00	0,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	1.313.740.000,00	1.313.740.000,00	0,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	210.773.000,00	210.773.000,00	0,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	33.112.000,00	33.112.000,00	0,00

5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	889.144.000,00	19.144.000,00	-870.000.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	25.338.000,00	25.338.000,00	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	25.338.000,00	25.338.000,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	12.091.962.400,00	12.114.990.400,00	23.028.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	5.288.719.500,00	5.297.497.500,00	8.778.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	5.288.719.500,00	5.297.497.500,00	8.778.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.803.242.900,00	6.817.492.900,00	14.250.000,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	106.466.400,00	106.466.400,00	0,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.201.828.500,00	1.216.078.500,00	14.250.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	5.444.000.000,00	5.444.000.000,00	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	13.448.000,00	13.448.000,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	2.940.009.802,00	2.940.009.802,00
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	0,00	2.940.009.802,00	2.940.009.802,00
5.2.02.15.04.0005	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	0,00	2.940.009.802,00	2.940.009.802,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	15.904.680.000,00	15.937.553.829,00	32.873.829,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	15.904.680.000,00	15.937.553.829,00	32.873.829,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	15.904.680.000,00	15.937.553.829,00	32.873.829,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	265.665.000,00	265.665.000,00	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	265.665.000,00	265.665.000,00	0,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	265.665.000,00	265.665.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	446.712.911.521,00	477.923.740.507,00	31.210.828.986,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	431.283.332.800,00	454.408.842.359,00	23.125.509.559,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	431.283.332.800,00	454.408.842.359,00	23.125.509.559,00

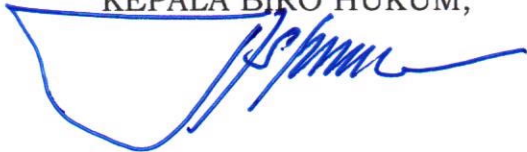
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	118.920.582.800,00	133.995.369.273,00	15.074.786.473,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	1.037.900.000,00	0,00	-1.037.900.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.900.000.000,00	8.900.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	154.641.500.000,00	159.680.825.403,00	5.039.325.403,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	1.547.638.290,00	1.547.638.290,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	182.483.500,00	182.483.500,00
5.2.03.01.01.0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	85.600.000.000,00	85.600.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	8.383.750.000,00	11.772.925.893,00	3.389.175.893,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	406.600.000,00	406.600.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	23.688.000.000,00	23.688.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	1.705.000.000,00	635.000.000,00	-1.070.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	24.800.000.000,00	24.800.000.000,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	15.429.578.721,00	23.514.898.148,00	8.085.319.427,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	15.429.578.721,00	23.514.898.148,00	8.085.319.427,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	14.813.578.721,00	22.898.898.148,00	8.085.319.427,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	616.000.000,00	616.000.000,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	253.967.964.426,00	313.616.887.527,00	59.648.923.101,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	203.348.823.226,00	235.262.946.961,00	31.914.123.735,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	192.548.823.226,00	213.166.035.740,00	20.617.212.514,00
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	126.375.826.226,00	146.993.038.740,00	20.617.212.514,00
5.2.04.01.01.0008	Belanja Modal Landasan Pacu Pesawat Terbang	66.172.997.000,00	66.172.997.000,00	0,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	10.800.000.000,00	22.096.911.221,00	11.296.911.221,00
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	0,00	11.296.911.221,00	11.296.911.221,00
5.2.04.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	16.919.370.200,00	20.428.972.116,00	3.509.601.916,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	16.919.370.200,00	17.784.770.183,00	865.399.983,00
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	0,00	220.598.528,00	220.598.528,00
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	11.327.750.000,00	17.564.171.655,00	6.236.421.655,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	5.591.620.200,00	0,00	-5.591.620.200,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	2.644.201.933,00	2.644.201.933,00

5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	2.644.201.933,00	2.644.201.933,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.416.000.000,00	3.622.295.000,00	2.206.295.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	700.000.000,00	2.906.295.000,00	2.206.295.000,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	0,00	2.206.295.000,00	2.206.295.000,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	716.000.000,00	716.000.000,00	0,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	466.000.000,00	466.000.000,00	0,00
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	32.283.771.000,00	54.302.673.450,00	22.018.902.450,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	32.283.771.000,00	54.302.673.450,00	22.018.902.450,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	32.283.771.000,00	54.302.673.450,00	22.018.902.450,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.300.000.000,00	4.500.000.000,00	200.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	4.300.000.000,00	4.500.000.000,00	200.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4.300.000.000,00	4.500.000.000,00	200.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	4.300.000.000,00	4.500.000.000,00	200.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	313.213.279.698,00	174.758.288.487,00	138.454.991.211,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	313.213.279.698,00	174.758.288.487,00	138.454.991.211,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	313.213.279.698,00	174.758.288.487,00	138.454.991.211,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	313.213.279.698,00	174.758.288.487,00	138.454.991.211,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	313.213.279.698,00	174.758.288.487,00	138.454.991.211,00
5.4	BELANJA TRANSFER	281.024.851.525,00	316.024.851.525,00	35.000.000.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	244.899.851.525,00	244.899.851.525,00	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	244.899.851.525,00	244.899.851.525,00	0,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	244.899.851.525,00	244.899.851.525,00	0,00
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	244.899.851.525,00	244.899.851.525,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	36.125.000.000,00	71.125.000.000,00	35.000.000.000,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	36.125.000.000,00	71.125.000.000,00	35.000.000.000,00
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	36.125.000.000,00	71.125.000.000,00	35.000.000.000,00
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	0,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00

5.4.02.01.02.0002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pendidikan	36.125.000.000,00	36.125.000.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	3.881.272.091.833,00	4.060.836.727.333,00	179.564.635.500,00
	Total Surplus/(Defisit)	0,00	-296.085.027.500,00	296.085.027.500,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	296.085.027.500,00	296.085.027.500,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	296.085.027.500,00	296.085.027.500,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	296.085.027.500,00	296.085.027.500,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	296.085.027.500,00	296.085.027.500,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	296.085.027.500,00	296.085.027.500,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	296.085.027.500,00	296.085.027.500,00
	Pembiayaan Netto	0,00	296.085.027.500,00	296.085.027.500,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002